

ANALISIS HUBUNGAN EFEKTIVITAS DAN PERTUMBUHAN RETRIBUSI DAERAH SERTA KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DALAM MENINGKATKAN KEMANDIRIAN FISKAL PEMERINTAH DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2020 - 2024

Siti Nabilah Khairunnisa¹; Achmad Hizazi²; Fitriani Mansur³

Universitas Jambi

Jl. Raya Jambi- Muara Bulian K.15 Mendalo Darat, Muaro Jambi, Jambi

E-mail : sitinabilaa0729@gmail.com (Koresponding)

Abstract: This study aims to analyze the relationship between the effectiveness, growth, and contribution of regional retribution to Local Own-Source Revenue (PAD), as well as its implications for improving the fiscal independence of the Jambi City Government during the 2020–2024 period. The study employs a quantitative approach. The results show that the effectiveness level of regional retribution has declined from a very effective category in 2020 (110.55%) to ineffective in 2024 (53.78%). The growth of regional retribution is fluctuating and tends to be negative after 2021, with a significant decrease of up to -18% in 2024. The contribution of regional retribution to PAD is relatively low, ranging from 7.11% to 13.48%, and shows a declining trend. Meanwhile, the fiscal independence level of Jambi City remains in the low category, with a ratio of 22%–27%, reflecting a high dependence on transfer funds from the central government.

Keywords: *Regional Retribution, Effectiveness, Growth, Contribution, PAD, Fiscal Independence*

Otonomi daerah di Indonesia telah menjadi tonggak penting dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal yang bertujuan meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan daerah. Dengan diberlakukannya kebijakan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diberi kewenangan luas untuk mengelola keuangan daerahnya sendiri guna mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan efisien (Pabayo, 2025). Desentralisasi fiskal tidak hanya menjadi instrumen pembagian kewenangan administratif, tetapi juga merupakan strategi fundamental dalam mempercepat pembangunan ekonomi lokal dan mengurangi kesenjangan antarwilayah di Indonesia (Vujanovic, 2017). Salah satu ukuran utama keberhasilan otonomi daerah adalah kemampuan daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan yang sah (Siswati & Kaloeti, 2024). Kinerja PAD menjadi indikator krusial karena

mencerminkan kapasitas fiskal daerah dalam mendanai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik tanpa bergantung sepenuhnya pada transfer dana dari pemerintah pusat (Marlina & Nugroho, 2021).

Kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah masih relatif rendah dibandingkan dengan transfer dari pemerintah pusat. Studi menunjukkan bahwa mayoritas pemerintah daerah di Indonesia masih sangat bergantung pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH), dengan kontribusi PAD yang bervariasi antar wilayah namun umumnya berada di bawah 30% dari total pendapatan daerah (Haryanto, 2017; Pabayo, 2025).

Kondisi ini menunjukkan masih terbatasnya kapasitas fiskal daerah dalam membiayai kebutuhan Pembangunan secara mandiri (Aritenang & Chandramidi, 2023). Kemandirian fiskal daerah salah satu indikator utama keberhasilan

pelaksanaan otonomi daerah dimana daerah yang memiliki tingkat kemandirian fiskal yang tinggi umumnya mampu membiayai kebutuhan pembangunannya sendiri dengan mengandalkan pendapatan asli daerah (PAD), sehingga ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat menjadi semakin kecil.

Retribusi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah memiliki peran strategis dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah karena bersumber langsung dari aktivitas pelayanan publik dan pemanfaatan fasilitas daerah. Kinerja retribusi daerah dapat diukur melalui rasio efektivitas, yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan target penerimaan, serta rasio pertumbuhan, yang menggambarkan dinamika kenaikan penerimaan dari waktu ke waktu (Avianti, 2024). Analisis kedua rasio tersebut memberikan gambaran sejauh mana kinerja retribusi daerah mendukung peningkatan PAD. Selain itu, rasio kontribusi retribusi terhadap PAD juga menjadi indikator penting untuk menilai seberapa besar peran retribusi dalam struktur penerimaan daerah secara keseluruhan (Suhendra & Yusuf, 2023). Pemahaman mendalam terhadap ketiga rasio ini akan memberikan landasan empiris bagi pemerintah daerah dalam merumuskan strategi peningkatan kinerja retribusi yang lebih akurat dan terukur (Putri & Sari, 2021)

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa efektivitas dan pertumbuhan PAD memiliki hubungan positif terhadap tingkat kemandirian fiskal daerah (Mulyati & Asyik, 2024; Juliarti & Hariyanto, 2022). Namun demikian, sebagian besar penelitian lebih banyak berfokus pada pajak daerah, sementara kontribusi retribusi daerah

terhadap PAD relatif kurang dieksplorasi. Inilah yang menjadi *research gap* penelitian ini, kurangnya kajian komprehensif yang mengukur hubungan antara rasio efektivitas, rasio pertumbuhan, dan rasio kontribusi retribusi terhadap PAD serta implikasinya terhadap kemandirian fiskal daerah. Padahal, retribusi daerah memiliki karakteristik yang berbeda dengan pajak daerah, baik dari sisi basis pemungutan, elastisitas terhadap kondisi ekonomi, maupun tingkat kepatuhan wajib bayar (Siswati & Kaloeti, 2024).

Oleh karena itu, kajian spesifik terhadap kinerja retribusi daerah menjadi sangat relevan untuk memberikan perspektif yang lebih komprehensif tentang optimalisasi PAD (Handayani & Syafitri, 2022). Kondisi tersebut mengindikasikan pentingnya dilakukan analisis lebih mendalam terhadap kinerja retribusi daerah Kota Jambi. Mengingat setiap jenis retribusi memiliki karakteristik penerimaan yang berbeda seperti retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu memiliki potensi dan tantangan yang berbeda dalam pengelolaannya, sehingga memerlukan pendekatan kebijakan yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing jenis retribusi (Suhendra & Yusuf, 2023). Analisis yang mendalam tidak hanya akan mengidentifikasi jenis retribusi mana yang berkinerja optimal, tetapi juga memberikan rekomendasi spesifik untuk meningkatkan kinerja jenis retribusi yang masih tertinggal (Putri & Sari, 2021).

Secara empiris, beberapa daerah yang berhasil meningkatkan efektivitas retribusinya menunjukkan tingkat kemandirian fiskal yang lebih tinggi. Misalnya, penelitian Zarkasi & Khairi (2024) menemukan bahwa peningkatan efektivitas PAD di kota-kota besar berkorelasi positif dengan penurunan ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat. Artinya, semakin besar kontribusi retribusi terhadap PAD, semakin kuat posisi keuangan daerah dalam membiayai

pembangunan daerahnya sendiri. Studi komparatif antarwilayah juga menunjukkan bahwa daerah dengan sistem administrasi retribusi yang baik, transparansi pengelolaan keuangan yang tinggi, dan inovasi layanan berbasis digital cenderung memiliki rasio efektivitas dan pertumbuhan retribusi yang lebih baik (Yuliani & Hidayat, 2024). Pengalaman daerah-daerah tersebut dapat menjadi rujukan penting bagi Kota Jambi dalam merancang strategi peningkatan kinerja retribusi daerah yang lebih sistematis dan berkelanjutan (Haryanto, 2017).

Dari perspektif kebijakan, rendahnya efektivitas retribusi daerah dapat disebabkan oleh lemahnya sistem administrasi pemungutan, kurangnya inovasi digitalisasi layanan, dan rendahnya kepatuhan wajib retribusi (Pabayo, 2025). Oleh karena itu, upaya peningkatan efektivitas dan pertumbuhan retribusi daerah harus diarahkan pada perbaikan sistem pengelolaan keuangan daerah, transparansi, dan peningkatan pelayanan publik. Kebijakan tarif retribusi yang rasional dan responsif terhadap kondisi ekonomi lokal juga perlu dievaluasi secara berkala agar tidak memberatkan masyarakat namun tetap mampu menghasilkan penerimaan yang optimal (Anggraeni & Khusaini, 2023).

Urgensi penelitian ini terletak pada kontribusinya dalam memberikan dasar empiris bagi Pemerintah Kota Jambi dalam memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi retribusi daerah. Dengan menganalisis rasio efektivitas, pertumbuhan, dan kontribusi retribusi daerah terhadap PAD, penelitian ini diharapkan mampu memberikan solusi strategis dalam meningkatkan kemampuan daerah untuk membiayai Pembangunan tanpa ketergantungan pada dana transfer pusat. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi kebijakan bagi daerah-daerah lain yang menghadapi tantangan serupa dalam mengoptimalkan sumber-sumber PAD, khususnya dari sektor retribusi (Rahmawati & Prasetyo, 2020).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif, yaitu pendekatan penelitian yang dilakukan dengan data yang diolah dan dianalisis berbentuk angka atau bilangan serta pengolahan dan analisisnya dilakukan menggunakan metode statistika (Sekaran, U., & Bougie, 2017). Objek penelitian meliputi efektivitas, pertumbuhan, dan kontribusi retribusi daerah sebagai variabel independen, serta kemandirian fiskal sebagai variabel dependen. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Jambi yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jambi periode 2020–2024. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dengan perhitungan rasio keuangan, yaitu rasio efektivitas, rasio pertumbuhan, rasio kontribusi retribusi terhadap PAD, serta rasio kemandirian fiskal.

HASIL

Rasio Efektivitas

Tabel 1. Rasio efektivitas retribusi pada Pemerintah Daerah Kota Jambi tahun 2020-2024

Tahun	Anggaran Retribusi	Realisasi Retribusi	Rasio Efektivitas	Kriteria
2020	36.618.000.000	40.479.596.103	110,55%	Sangat Efektif
2021	55.312.900.000	51.844.265.472	93,73%	Efektif
2022	50.544.550.000	40.216.623.270	79,57%	Kurang Efektif
2023	56.976.320.000	39.366.332.492	69,09%	Kurang Efektif
2024	60.192.320.000	32.371.125.336	53,78%	Tidak Efektif

Sumber : Data Olahan Peneliti

Berdasarkan tabel 1. dapat dilihat bahwa rasio efektivitas retribusi daerah Pemerintah Kota Jambi selama periode 2020-2025 menunjukkan kecenderungan yang fluktuatif dan cenderung menurun dengan nilai rasio berkisar antara 53,78% hingga 110,55%. Rasio efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar 110,55% dengan kriteria sangat efektif, sedangkan

rasio terendah terjadi pada tahun 2024 sebesar 53,78% dengan kriteria tidak efektif. Kondisi ini menunjukkan bahwa pada awal periode penelitian kinerja pemungutan retribusi daerah tergolong sangat baik, namun pada tahun-tahun berikutnya mengalami penurunan.

Rasio Pertumbuhan

Berdasarkan tabel 2. berikut ini dapat dilihat bahwa rasio pertumbuhan daerah Pemerintah Kota Jambi selama 2020-2024 nilainya antara 5,03%, 28,08%, -22,43%, -2,11% dan -18% dengan kategori rendah hingga sangat rendah. Penurunan pertumbuhan retribusi daerah ini sejalan dengan hasil analisis rasio efektivitas sebelumnya, yang menunjukkan kecenderungan menurun dari tahun ke tahun. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa meskipun target realisasi terus meningkat, realisasi penerimaan justru mengalami penurunan sehingga berdampak pada rendahnya tingkat efektivitas dan pertumbuhan retribusi daerah.

Tabel 2. Rasio Pertumbuhan Pendapatan Retribusi Daerah Pada Pemerintah Kota Jambi Tahun 2020-2024

Tahun	Realisasi Pendapatan retribusi (T)	Realisasi Pendapatan retribusi (t-1)	Rasio Pertumbuhan	Kriteria
2020	40.479.596.103	38.540.603.597,00	5,03%	Rendah
2021	51.844.265.427	40.479.596.103	28,08%	Sedang
2022	40.216.623.270	51.844.265.427	-22,43%	Sangat Rendah
2023	39.366.332.496	40.216.623.270	-2,11%	Sangat Rendah
2024	32.371.125.336	39.366.332.496	-18%	Sangat Rendah

Sumber : Data Olahan Peneliti

Rasio Kontribusi

Berdasarkan tabel 3. dapat dilihat bahwa rasio kontribusi retribusi daerah terhadap PAD Pemerintah Kota Jambi selama 2020-2024 menunjukkan nilai yang relatif rendah, yaitu berkisar antara 7,11% hingga 13,48%. Dimana kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 13,48% dengan kriteria kurang, sedangkan kontribusi terendah terjadi pada tahun 2024 sebesar 7,11% dengan kriteria sangat kurang.

Tabel 3. Rasio Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap PAD Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun 2020-2024

Tahun	Realisasi Retribusi	Realisasi PAD	Rasio Kontribusi retribusi	Kriteria
2020	40.479.596.103	355.647.818.034	11,38%	Kurang
2021	51.844.265.427	384.730.643.791	13,48%	Kurang
2022	40.216.623.270	437.025.956.388	9,20%	Sangat Kurang
2023	39.366.332.496	448.460.640.790	8,78%	Sangat Kurang
2024	32.371.125.336	455.255.451.611	7,11%	Sangat Kurang

Sumber : Data Olahan Peneliti

Hasil ini menunjukkan bahwa selama periode penelitian, retribusi daerah belum memberikan kontribusi yang optimal terhadap PAD Kota Jambi. Penurunan rasio kontribusi tersebut terjadi seiring dengan menurunnya realisasi retribusi daerah, sementara realisasi PAD secara keseluruhan justru mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan PAD Kota Jambi tidak sejalan dengan peningkatan retribusi daerah, sehingga peran retribusi sebagai salah satu sumber PAD semakin lemah, dengan hasil analisis di atas mengindikasikan perlunya optimalisasi pemungutan retribusi daerah agar dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap PAD serta mendukung peningkatan kemandirian fiskal daerah

Rasio Kemandirian Fiskal

Tabel 4 Rasio Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun 2020-2024

Tahun	Total PAD	Total Pendapatan	Rasio Kemandirian Fiskal	Pola Hubungan
2020	355.674.818.034	1.621.827.275.395	22%	Instruktif
2021	384.730.643.791	1.652.948.449.755	23%	Instruktif
2022	437.025.956.388	1.668.797.755.119	26%	Konsultatif
2023	448.460.640.790	1.662.743.583.686	27%	Konsultatif
2024	455.255.451.611	1.765.182.353.922	26%	Konsultatif

Sumber : Data Olahan Peneliti

Berdasarkan Tabel 4. dapat dilihat bahwa rasio kemandirian fiskal Pemerintah Daerah Kota Jambi selama tahun 2020–2024 berada pada kisaran 22%–27% dengan pola hubungan instruktif pada tahun 2020–2021 dan konsultatif pada tahun 2022–2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi peningkatan PAD dari tahun ke tahun, peranan pendapatan transfer masih dominan. Rendahnya kemandirian fiskal ini

juga mencerminkan belum optimalnya kontribusi PAD, khususnya retribusi daerah, dalam meningkatkan kapasitas fiskal Pemerintah Kota Jambi.

PEMBAHASAN

Tingkat Efektivitas Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Fiskal Kota Jambi Tahun 2020–2024

Berdasarkan hasil analisis mendalam terhadap data Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, tingkat efektivitas pemungutan retribusi daerah Kota Jambi selama periode 2020–2024 menunjukkan kecenderungan penurunan yang konsisten dan mengkhawatirkan, dari kategori sangat efektif (di atas 100%) menjadi tidak efektif (di bawah 80%). Tren ini mencerminkan kerentanan struktural retribusi terhadap faktor eksternal seperti pandemi, perubahan regulasi nasional, dan dinamika ekonomi. Pada tahun 2020, Pemerintah Kota Jambi menetapkan target retribusi sebesar Rp36.618.000.000 dengan realisasi mencapai Rp40.479.596.103 atau efektivitas 110,55%. Tingginya rasio ini tidak sepenuhnya mencerminkan optimalisasi kinerja pemungutan, melainkan dipengaruhi oleh penetapan target yang relatif konservatif, ketahanan sektor retribusi esensial seperti pelayanan kesehatan, serta minimnya dampak awal pandemi Covid-19 pada layanan rutin masyarakat.

Memasuki tahun 2021, efektivitas mengalami penurunan menjadi 93,73% dengan realisasi Rp51.844.265.427 terhadap target Rp55.312.900.000, meskipun secara nominal terjadi peningkatan sebesar Rp11,36 miliar dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan nominal ini primarily didorong oleh pemulihan bertahap aktivitas ekonomi pasca-pembatasan pandemi, yang meningkatkan penerimaan pada indikator retribusi pelayanan kesehatan (akibat lonjakan kebutuhan medis) dan pelayanan pemakaman (sehubungan dengan peningkatan mortalitas akibat Covid-19). Namun, tren penurunan efektivitas mulai terlihat akibat ketidaksesuaian target yang mulai ambisius dengan kapasitas pemulihan sektor usaha.

Pada tahun 2022, efektivitas semakin merosot menjadi 79,57% dengan realisasi hanya Rp40.216.623.270 dari target Rp50.544.550.000. LHP BPK mengidentifikasi faktor utama sebagai tutupnya banyak wajib retribusi persampahan (sektor usaha kecil terdampak resesi pasca-pandemi), rendahnya tingkat kepatuhan pembayaran akibat kesulitan likuiditas pelaku usaha, serta gangguan operasional pada retribusi parkir tepi jalan umum yang disebabkan oleh proyek pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Kondisi ini menandai transisi dari pemulihan ke stagnasi, di mana faktor internal seperti penegakan disiplin pemungutan belum optimal.

Penurunan berlanjut pada tahun 2023 dengan rasio efektivitas 69,09%, di mana realisasi Rp39.366.332.496 jauh di bawah target Rp56.976.320.000. Catatan BPK menyoroti kendala signifikan seperti penurunan kunjungan pasien rawat inap pada layanan kesehatan (akibat preferensi telemedicine), gangguan teknis pada aplikasi pengujian kendaraan bermotor, serta disrupsi perdagangan daring yang menggerus aktivitas pasar tradisional. Faktor ini mengamplifikasi ketergantungan retribusi pada sektor konvensional yang rentan terhadap transformasi digital.

Kondisi mencapai titik terendah pada tahun 2024, dengan efektivitas hanya 53,78% (realisasi Rp32.371.125.336 dari target Rp60.192.320.000). Penurunan drastis ini dipicu oleh faktor struktural berupa penghentian pemungutan beberapa jenis retribusi akibat kebijakan nasional, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat-Daerah, termasuk pengujian kendaraan bermotor, terminal, pemeriksaan alat pemadam kebakaran, dan tera/tera ulang serta 11 indikator lainnya yang telah hilang sebagai penerimaan retribusi.

Tingkat Pertumbuhan Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Fiskal Kota Jambi Tahun 2020–2024

Berdasarkan data LHP BPK,

pertumbuhan retribusi daerah Kota Jambi selama periode penelitian menunjukkan pola yang fluktuatif dimana pada tahun 2021 terjadi pertumbuhan positif sebesar 28,08% dibandingkan tahun sebelumnya. Realisasi retribusi meningkat dari Rp40.479.596.103 pada tahun 2020 menjadi Rp51.844.265.427 ditahun 2021. Peningkatan ini dipengaruhi oleh mulai pulihnya aktivitas ekonomi setelah masa pandemi serta meningkatnya penerimaan pada beberapa jenis retribusi seperti pelayanan kesehatan dan pelayanan pemakaman.

Namun setelah tahun 2021, pertumbuhan retribusi mengalami kontraksi yang cukup signifikan dapat dilihat pada tahun 2022 realisasi retribusi menurun menjadi Rp40.216.623.270 atau turun sebesar Rp11,62 miliar dibandingkan tahun sebelumnya, penurunan ini dipengaruhi oleh berbagai kendala seperti penurunan jumlah usaha yang aktif membayar retribusi persampahan, berkurangnya lokasi parkir akibat proyek pembangunan IPAL, serta rendahnya pemanfaatan rumah potong hewan milik pemerintah daerah.

Penurunan tersebut berlanjut pada tahun 2023 dengan realisasi sebesar Rp39.366.332.496 atau turun sekitar 2,11% dibandingkan tahun 2022. Berdasarkan laporan BPK, beberapa faktor yang mempengaruhi penurunan tersebut antara lain gangguan sistem pada layanan pengujian kendaraan bermotor, menurunnya jumlah kunjungan pasien rawat inap, serta meningkatnya aktivitas perdagangan melalui e-commerce yang mengurangi aktivitas pasar tradisional. Kondisi penurunan pertumbuhan retribusi semakin terlihat pada tahun 2024 dengan realisasi sebesar Rp32.371.125.336 atau turun sebesar 17,77% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini dipengaruhi oleh penghentian pemungutan beberapa jenis retribusi seperti pengujian kendaraan bermotor, terminal, dan tera/tera ulang akibat implementasi kebijakan fiskal nasional. Selain itu, perubahan struktur pelayanan publik seperti pengelolaan penyedotan limbah domestik yang dialihkan menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) juga

menyebabkan penerimaan retribusi tidak lagi tercatat sebagai pendapatan retribusi daerah. Pertumbuhan yang cenderung negatif tersebut menunjukkan bahwa retribusi daerah belum memiliki stabilitas sebagai sumber penerimaan yang berkelanjutan. Ketika pertumbuhan penerimaan tidak stabil, kemampuan daerah dalam meningkatkan pendapatan secara mandiri juga menjadi terbatas. Oleh karena itu, ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat masih relatif tinggi.

Kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD Kota Jambi Tahun 2020–2024

Berdasarkan hasil analisis data keuangan daerah Kota Jambi, kontribusi retribusi terhadap PAD selama periode penelitian berada pada kisaran 7% hingga 13% dan cenderung mengalami penurunan. Pada awal periode penelitian, kontribusi retribusi masih cukup signifikan dalam mendukung PAD. Namun seiring waktu, kontribusi tersebut mengalami penurunan meskipun nilai PAD secara keseluruhan justru mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan PAD Kota Jambi lebih banyak didorong oleh peningkatan penerimaan pajak daerah dibandingkan dengan retribusi daerah.

Rendahnya kontribusi retribusi daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, secara regulasi jenis retribusi yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah telah dibatasi oleh kebijakan nasional sehingga ruang fiskal daerah menjadi lebih sempit. Kedua, retribusi bersifat berbasis penggunaan jasa atau layanan publik sehingga penerimaannya sangat bergantung pada tingkat pemanfaatan layanan oleh masyarakat. Selain itu, perubahan perilaku masyarakat juga mempengaruhi kontribusi retribusi.

Meningkatnya aktivitas perdagangan online menyebabkan menurunnya aktivitas pasar tradisional yang sebelumnya menjadi sumber penerimaan retribusi pelayanan pasar. Di sisi lain, meningkatnya pembangunan di berbagai wilayah Kota

Jambi menyebabkan distribusi aktivitas ekonomi menjadi lebih merata sehingga kunjungan ke kawasan pusat kota, khususnya Pasar Jambi, mengalami penurunan yang berdampak pada penerimaan retribusi parkir.

Hubungan Efektivitas, Pertumbuhan, dan Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Fiskal Pemerintah Kota Jambi

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, efektivitas retribusi daerah Kota Jambi selama periode 2020–2024 menunjukkan kecenderungan menurun. Pada awal periode penelitian, realisasi retribusi masih mampu melampaui target yang telah ditetapkan. Namun pada tahun-tahun berikutnya tingkat efektivitas terus mengalami penurunan hingga berada pada kategori kurang efektif. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan target penerimaan retribusi masih menghadapi berbagai kendala, baik yang disebabkan oleh faktor administratif, perubahan regulasi, maupun perubahan kondisi ekonomi masyarakat. Ketika realisasi penerimaan tidak mampu mencapai target yang ditetapkan, maka potensi penerimaan daerah yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembiayaan pembangunan menjadi tidak optimal.

Dari sisi pertumbuhan, penerimaan retribusi daerah Kota Jambi juga menunjukkan pola yang fluktuatif. Meskipun pada awal periode penelitian terjadi peningkatan penerimaan, pada tahun-tahun berikutnya pertumbuhan retribusi cenderung mengalami penurunan bahkan mencapai pertumbuhan negatif. Penurunan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti menurunnya pemanfaatan beberapa layanan publik, perubahan perilaku ekonomi masyarakat, serta adanya penyesuaian kebijakan pemerintah pusat yang berdampak pada jenis retribusi yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah. Pertumbuhan yang tidak stabil tersebut menunjukkan bahwa retribusi daerah belum mampu menjadi sumber penerimaan yang berkembang secara

konsisten dari tahun ke tahun. Sementara itu, dari sisi kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), retribusi daerah Kota Jambi memiliki peran yang relatif kecil dibandingkan dengan sumber pendapatan daerah lainnya. Struktur PAD Kota Jambi masih didominasi oleh penerimaan pajak daerah, sehingga peningkatan PAD lebih banyak dipengaruhi oleh kinerja pajak daerah dibandingkan dengan retribusi daerah. Rendahnya kontribusi ini menunjukkan bahwa retribusi daerah lebih berfungsi sebagai sumber pendapatan pelengkap dalam struktur PAD, sehingga pengaruhnya terhadap peningkatan kapasitas fiskal daerah menjadi terbatas.

Jika ketiga indikator tersebut dikaitkan dengan kemandirian fiskal daerah, maka dapat dilihat bahwa efektivitas yang menurun, pertumbuhan yang tidak stabil, serta kontribusi yang relatif kecil menyebabkan retribusi daerah belum mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kemandirian fiskal Kota Jambi. Dengan kata lain, kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan secara mandiri masih sangat bergantung pada sumber pendapatan lain, terutama dana transfer dari pemerintah pusat. Selain itu, perubahan kebijakan nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah juga menyebabkan beberapa jenis retribusi daerah tidak lagi dipungut oleh pemerintah daerah. Kebijakan ini secara tidak langsung mempengaruhi kapasitas fiskal daerah karena berkurangnya sumber penerimaan retribusi yang sebelumnya menjadi bagian dari PAD.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian komprehensif mengenai efektivitas, pertumbuhan, kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta implikasinya terhadap kemandirian fiskal Pemerintah Kota Jambi periode 2020–2024 maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tingkat efektivitas retribusi daerah Kota Jambi selama periode 2020 hingga 2024
Pada tahun 2020, rasio efektivitas mencapai kategori sangat efektif sebesar 110,55% (realisasi Rp40,48 miliar dari target Rp36,62 miliar), didorong ketahanan sektor esensial meskipun pandemi. Namun, efektivitas menurun menjadi efektif pada 2021 (93,73%), kurang efektif pada 2022 (79,57%) dan 2023 (69,09%), serta tidak efektif pada 2024 (53,78%; realisasi Rp32,37 miliar dari target Rp60,19 miliar). Penurunan ini disebabkan oleh perubahan regulasi yang menghapus indikator kunci (misalnya pengujian kendaraan bermotor, IMB menjadi PBG), rendahnya kepatuhan wajib bayar, gangguan operasional (seperti IPAL dan aplikasi digital), serta disrupsi perdagangan online, sehingga kemampuan realisasi target belum optimal.
2. Tingkat pertumbuhan retribusi daerah Kota Jambi selama periode 2020 hingga 2024
Pertumbuhan hanya positif signifikan pada 2021 (28,08%) akibat pemulihan pasca-pandemi di sektor kesehatan dan pemakaman, tetapi berbalik negatif pada tahun-tahun berikutnya: -22,43% (2022), -2,11% (2023), dan -18% (2024). Pola ini mencerminkan ketidakstabilan penerimaan akibat hilangnya retribusi jasa umum/usaha (seperti terminal turun dari Rp1 miliar menjadi Rp6 juta) dan perizinan, ditambah penurunan aktivitas pasar tradisional serta rumah potong hewan, sehingga retribusi gagal berkembang sebagai sumber PAD yang berkelanjutan.
3. Kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah
Proporsi kontribusi berfluktuasi antara 7,11% (2024, terendah) hingga 13,48% (2021, tertinggi), dengan tren menurun akibat penghapusan 11 indikator retribusi (seperti tera/tera ulang, hutan kota M. Sabki, dan PBG). Hal ini menegaskan peran retribusi sebagai pendapatan pelengkap, bukan pilar utama PAD, yang didominasi pajak daerah dan transfer pusat.
4. Hubungan efektivitas, pertumbuhan, dan kontribusi retribusi terhadap kemandirian fiskal
Rasio kemandirian fiskal Kota Jambi stagnan pada kisaran 22% – 27% dengan pola instruktif hingga konsultatif, menunjukkan ketergantungan tinggi pada dana transfer pusat. Retribusi yang rentan terhadap regulasi nasional (UU Nomor 1/2022) dan faktor eksternal gagal menjadi penggerak utama, sehingga pembiayaan pembangunan daerah masih bergantung pada sumber eksternal. Secara keseluruhan, kondisi ini menggambarkan kerentanan struktural retribusi daerah di Kota Jambi, yang memerlukan intervensi strategis untuk transformasi menjadi sumber fiskal tangguh.

DAFTAR RUJUKAN

- Anggraeni, R. M., & Khusaini, M. (2023). Fiscal decentralization and its effect on poverty alleviation: Case study of Indonesia. *Bulletin of Islamic Economics*, 1(2), 78–92.
- Aritenang, A. F., & Chandramidi, A. N. (2023). The spatial effects of fiscal decentralization on regional convergence: The case of regions in Indonesia. *GeoJournal*, 88(5), 4123–4142.
- Avianti, W. (2024). Regional decentralization of Purwakarta 2018–2022: Effectiveness and growth of local original income. *Jurnal Akuntansi Inaba*, 3(1), 45–60.
- Handayani, E., & Syafitri, D. (2022). Local retribution performance and fiscal autonomy in Indonesian municipalities. *Asian Journal of Regional Economics*, 10(2), 211–230.
- Haryanto, J. T. (2017). Mapping the local own resources (PAD) performance and regional dependence in Indonesia 2008–2014: Quadrant method approach. *Jurnal Bina Praja*, 9(2), 133–144.

- Juliarti, A., & Hariyanto, D. (2022). Case study on regional original income: Analysis of effectiveness, efficiency, fiscal decentralization, and regional financial dependence ratio. *Journal of Applied Management Research and Economic Studies*, 3(3), 210–225.
- Marlina, D., & Nugroho, A. (2021). Analisis kemandirian fiskal pemerintah daerah dalam era desentralisasi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 29(2), 102–118.
- Mulyati, S., & Asyik, N. F. (2024). The degree of fiscal decentralisation, independence, revenue effectiveness, and financial efficiency in measuring financial performance of local governments. *Proceedings of ICOBUSS*, 2(1), 134–146.
- Pabayo, A. S. T. (2025). Impact of fiscal decentralization policy on regional fiscal independence in Indonesia. *LOGOS: Journal of Economics and Public Policy*, 14(1), 23–41.
- Putri, A. F., & Sari, R. (2021). Local financial performance through PAD growth and its impact on fiscal independence. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomi Daerah*, 12(3), 144–159.
- Putri, A. N. (2023). Pengaruh Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dan Rasio Kemandirian Keuangan terhadap Rasio Financial Distress Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah [Skripsi, Universitas Tidar]. Repositori Mahasiswa UNTIDAR.
- Rahmawati, N., & Prasetyo, Y. (2020). Determinants of local government fiscal independence in Indonesia. *International Journal of Public Sector Management*, 33(4), 423–440.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). *Research Methods for Business: A Skill-Building Approach* (7th Editio). Willey
- Siswati, S., & Kaloeti, A. K. (2024). Analysis of local tax revenue, local retribution, and other legitimate local revenue to Kediri District's local revenue. *Jurnal Kinerja*, 28(2), 55–69.
- Suhendra, B., & Yusuf, I. (2023). The role of regional retribution in increasing local fiscal capacity in Indonesia. *Journal of Public Administration and Policy Studies*, 15(1), 34–49.
- Vujanovic, P. (2017). Decentralisation to promote regional development in Indonesia. OECD Economics Department Working Papers, No. 1815.